

LANGKAH-LANGKAH
TEROBOSAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR
2005-2009



LANGKAH-LANGKAH TEROBOSAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR 2005-2009

emangat reformasi pendidikan yang tersurat dan tersirat dalam amandemen UUD 1945, UU Sisdiknas, serta UU Guru dan Dosen telah menginspirasi Departemen Pendidikan Nasional untuk mengambil berbagai kebijakan terobosan yang mendasar dan berskala besar selama periode 2005-2009, yang dalam jangka menengah dan panjang diharapkan akan berdampak besar pada peningkatan dan pemerataan akses pendidikan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Sembilan kebijakan terobosan berskala nasional selama kurun waktu 2005-2009 pada Lakip Depdiknas tahun 2009 sebagai berikut.

- 1. Pendanaan massal pendidikan;
- 2. Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan secara massal;
- 3. Penerapan TIK secara massal untuk e-pembelajaran dan e-administrasi;
- 4. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan secara massal;
- 5. Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan secara massal;
- 6. Reformasi perbukuan secara mendasar;
- 7. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif;
- 8. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif;
- 9. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (*reaching the unreached*).

Kebijakan Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang mendukung kebijakan nasional tersebut adalah mengupayakan pendidikan pada jenjang TK dan SD yang bermutu dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia usia 4-12 tahun.

Terkait dengan kebijakan terobosan Depdiknas 2005-2009, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar melakukan langkahlangkah sebagai berikut.

1. Pendanaan Masal Pendidikan

Pendanaan pendidikan merupakan salah satu terobosan yang dilakukan Depdiknas atas dukungan DPR RI. Kebijakan pendanaan di Direktorat Pembinaan TK dan SD merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan pendanaan Depdiknas. Program pendanaan di Direktorat Pembinaan TK dan SD semakin meningkat jumlah besarannya, karena menunjukkan hasil yang menggembirakan dan dirasakan dampak manfaatnya oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Program pendanaan pendidikan TK dan SD pada kurun waktu 2005-2009 meliputi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program BOS Buku, dan program beasiswa.

a. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Program BOS yang dimulai sejak tahun 2005 merupakan pengembangan dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan, dimaksudkan sebagai subsidi biaya operasional sekolah kepada semua peserta didik program wajib belajar. Dengan adanya program BOS, diharapkan satuan pendidikan tidak lagi memungut biaya operasional sekolah kepada peserta didik, terutama yang miskin. BOS dialokasikan kepada semua sekolah dan madrasah serta bentuk lainnya yang sederajat, baik negeri maupun swasta, yang melaksanakan program wajib belajar 9 tahun. Besarnya alokasi BOS per satuan pendidikan ditentukan atas dasar jumlah peserta didik dengan biaya satuan Rp. 235.000,00/siswa (tahun 2005), mulai tahun 2006 besarnya BOS adalah Rp. 254.000,00/siswa untuk SD/MI, mulai tahun 2009 besarnya adalah Rp. 397.000,00/siswa untuk kabupaten dan Rp. 400.000,00/siswa untuk kota.

b. BOS Buku

BOS buku dimaksudkan sebagai subsidi kepada semua peserta didik wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang disalurkan melalui satuan pendidikan, sehingga diharapkan siswa miskin dapat mengakses buku teks pelajaran yang digunakan satuan pendidikan melalui peminjaman buku di perpustakaan sekolah.

BOS buku diharapkan dapat meringankan beban biaya pendidikan bagi siswa miskin dan sekaligus meningkatkan mutu pendidikan.

c. Beasiswa

Beasiswa adalah bantuan/subsidi dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada siswa sekolah dasar sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan pemberian beasiswa, yaitu: 1) memberi motivasi kepada siswa untuk meningkatkan prestasi belajarnya; 2) membantu siswa SD dari keluarga tidak mampu/miskin agar dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Beasiswa bakat dan prestasi dimulai tahun 2005 hingga tahun 2007, mulai tahun 2008 beasiswa prestasi dialihkan menjadi beasiswa untuk siswa miskin, dengan besaran beasiswanya meningkat dari Rp. 300 ribu per tahun menjadi Rp. 360 ribu per tahun.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus yang dimulai sejak tahun 2003 dialokasikan kepada hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di 32 provinsi. Program DAK dimaksudkan untuk merehabilitasi ruang kelas SD yang mengalami kerusakan. Alokasi DAK terus meningkat setiap tahunnya dengan total dana sejak 2003 s.d 2009 telah mencapai 27 trilyun. Program ini telah berperan besar dalam menunjang program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pembangunan sarana dan prasarana TK dan SD merupakan upaya Direktorat Pembinaan TK dan SD untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Taman Kanak-kanak dan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar.

a. Taman Kanak-kanak

Pembangunan sarana dan prasarana TK merupakan upaya Direktorat Pembinaan TK dan SD untuk meningkatkan akses anak masuk TK. Angka Partisipasi Kasar (APK) TK tahun 2005 adalah 30,37%, tahun 2006 sebesar 32,78%, tahun 2007 sebesar 35,17%, tahun 2008 sebesar 40,40%, dan Direktorat Pembinaan TK dan SD pada tahun 2009 menargetkan APK

TK sebesar 40,59%. Untuk mencapai target tersebut beberapa terobosan dilakukan Direktorat Pembinaan TK dan SD pada kurun waktu 2005-2009 sebagai berikut;

- (1) Pembangunan/pendirian TK Negeri Pembina. Pendirian TK Negeri Pembina mencakup TK Negeri Pembina Provinsi, TK Negeri Pembina Kabupaten/kota bagi provinsi, kabupaten/kota pemekaran dan bagi kabupaten/kota yang belum memiliki TK Negeri Pembina.
- (2) Pembangunan TK Pembina Kecamatan. Pembangunan TK Pembina Kecamatan dimulai sejak tahun 2005 secara bertahap, diharapkan masing-masing kecamatan memiliki TK Pembina Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan TK-SD Satu Atap. Penyelenggaraan dan pengelolaan Taman Kanak-kanak yang berada dalam lokasi atau satu atap dengan SD, merupakan layanan pendidikan alternatif TK, dalam rangka mendukung keberhasilan pembelajaran pada masa transisi antara TK dan SD kelas awal.
- (4) Pembangunan Ruang Kelas Baru TK. Pembangunan Ruang Kelas Baru TK yang dimulai sejak 2008 dimaksudkan untuk meningkatkan daya tampung anak-anak usia TK.

b. Sekolah Dasar

Pembangunan sarana dan prasarana SD sebagai terobosan kebijakan yang dilakukan Direktorat Pembinaan TK dan SD pada kurun waktu 2005-2009 meliputi: (1) Pembangunan Perpustakaan SD; (2) Pembangunan TK/SD bertaraf internasional.

Pembangunan perpustakaan SD merupakan salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan serta menjamin terlaksananya proses pembelajaran peserta didik dengan baik. Penyiapan perpustakaan SD selama kurun waktu 2005-2009 ditargetkan minimal 40% SD memiliki perpustakaan. Pembangunan perpustakaan sekolah didanai melalui APBN, APBN Perubahan, DAK Bidang Pendidikan dan Dana Dekonsentrasi.

Pembangunan TK dan SD bertaraf internasional atau dikenal dengan sebutan TK-SD Model, dirancang sebagai lembaga layanan pendidikan berkualitas tinggi, baik dari aspek sarana dan prasarana, proses pembelajaran, guru, maupun pengelolaannya. Program ini dimulai oleh Direktorat Pembinaan TK dan SD sejak tahun 2003.



Perpustakaan merupakan jantung sekolah. Tampak peserta didik SD sedang memanfaatkan fasilitas perpustakaan

3. Rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan

Rehabilitasi sarana dan prasarana SD dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi gedung SD/MI yang rusak. Data tahun 2005 menunjukkan ruang kelas SD/MI yang rusak berat dan sedang sebanyak 502.820, atau kurang lebih 49,95% dari total ruang kelas SD seluruh Indonesia. Pada tahun 2008 kerusakan infrastruktur SD menurun sehingga sebesar 18,9% atau 33.842 sekolah atau 202.795 Ruang Kelas. Pada tahun 2009 ruang kelas rusak sudah jauh menurun menjadi 10%.

Rehabilitasi sarana dan prasarana SD/MI dilakukan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, APBN, Dekonsentrasi, *Debt swap for education* dan APBN Perubahan.

4. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif

Depdiknas telah mengembangkan sebuah pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Pendekatan komprehensif ini didesain berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan dikembangkannya Standar Nasional pendidikan dan pemberian otonomi yang luas kepada satuan Pendidikan.

Atas dasar undang-undang tersebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan tugas utama mengembangkan 8 standar nasional pendidikan, meliputi: (1) Standar Isi, (2) Standar Kompetensi Lulusan, (3) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (4) Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, (5) Standar Penilaian Pendidikan, (6) Standar Proses, (7) Standar Pengelolaan, dan (8) Standar Pembiayaan. Penetapan SNP digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

a. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

Sesuai dengan definisi yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP berisi tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Hal ini dimaksudkan sebagai tujuan pendidikan nasional yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dan disesuaikan dengan karakteristik, kondisi dan potensi daerah, sekolah serta peserta didik. Kurikulum yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan inilah yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP.

KTSP disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan tujuan pendidikan nasional. KTSP disusun dengan berpedoman pada: (1) Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi; (2) Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), (3) Permendiknas nomor 24 tahun 2006 junto Nomor 6 tahun 2007 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 tahun 2006; (4) Panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Berdasarkan pada Permendiknas Nomor 24 tahun 2006 dan Permendiknas Nomor 6 tahun 2007 bahwa KTSP dapat dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006/2007 dan selambatlambatnya harus sudah dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/2010. Direktorat Pembinaan TK dan SD sejak tahun 2006 telah melakukan kegiatan terkait dengan sosialisasi KTSP kepada para pemangku kepentingan (*stake holders*) pendidikan, pengawas, kepala sekolah dan guru. Dengan demikian diharapkan pada tahun 2009/2010 KTSP dapat dilaksanakan secara nasional oleh seluruh SD di Indonesia.

b. Sekolah Dasar Standar Nasional (SDSN)

Dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana penjelasan PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 11 ayat (2) dan (3), pemerintah memetakan sekolah/madrasah menjadi sekolah/madrasah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya pemerintah mengkategorikan sekolah/madrasah yang telah memenuhi atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori mandiri, dan sekolah/madrasah yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan ke dalam kategori standar.

Sekolah Dasar Standar Nasional selanjutnya disebut SDSN adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan dalam kategori mandiri. Standarstandar tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian.

Tujuan penyelenggaraan SDSN adalah: (1) memfungsikan SD/MI menjadi pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai; (2) menjamin terwujudnya mutu pendidikan sekolah dasar yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat; dan (3) meningkatkan mutu layanan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Untuk mendorong sekolah-sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan, sejak tahun 2007 Direktorat Pembinaan TK dan SD melakukan pembinaan dalam bentuk pemberian blockgrant penyelenggaraan SDSN.

c. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Untuk memenuhi amanat undang-undang tersebut, Direktorat Pembinaan TK dan SD sejak 2003 telah menyelenggarakan rintisan sekolah dasar bertaraf internasional dalam dua pola yaitu: (1) *Newly developed* (membangun sekolah baru) dan (2) *existing developed* (mengembangkan sekolah yang ada).



Gedung TK SD Bertaraf Internasional Kota Malang. Salah satu contoh hasil program pembangunan sarana dan prasarana TK SD.

d. Lomba dan Kompetisi TK dan SD

Dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai visi Depdiknas, Direktorat Pembinaan TK dan SD melakukan terobosan pembinaan melalui berbagai kegiatan lomba dan kompetisi baik tingkat nasional dan internasional.

Lomba dan Kompetisi TK dan SD Tingkat Nasional, meliputi: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Indonesia Sains Festival (ISF), Lomba Gugus TK dan SD dan Lomba Perpustakaan SD.

Lomba dan Kompetisi TK dan SD Tingkat Internasional, meliputi: International Mathematics and Science Olympiad (IMSO), Mathematics World Contest, Elementary Mathematics International Contest, World School Chess Championship, dan Asean Primary School Sports Olympiad (APSSO)

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan dengan pendekatan komprehensif

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan merupakan pilar pembangunan pendidikan yang dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis. Untuk mencapai hal tersebut Direktorat Pembinaan TK dan SD mengikuti kerangka sebagai berikut: (1) meningkatkan mutu manajemen unit kerja melalui program sertifikasi ISO 9001:2000 dan (2) meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur kerja dengan mengintegrasikan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke dalam sistem dan prosedur melalui suatu sistem informasi manajemen (SIM) yang handal.

a. Sertifikasi ISO

Dalam rangka memberikan layanan prima dan bertaraf internasional, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar, akan menerapkan penjaminan mutu pekerjaan manajerial dan administratif melalui sertifikasi ISO.

Sejak tahun 2007 Direktorat Pembinaan TK dan SD telah memulai melakukan persiapan, dan tahun 2008 memperoleh sertifikat ISO 9001:2000, kemudian tahun 2009 telah di*upgrade* menjadi ISO 9001:2008.

b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Dalam upaya perbaikan tata kelola dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi mekanisme penanganan pekerjaan manajerial dan administrasi, Direktorat Pembinaan TK dan SD menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Penerapan infrastruktur Sistem Informasi Manajemen menitik beratkan pada peningkatan akses dan keterhubungan antar unit kerja (workstation). Hal ini dicapai dengan pengembangan jaringan komputer lokal di tingkat direktorat beserta perangkat keras pendukungnya.



